

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan bank atau perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.¹ Prinsip syariah adalah prinsip yang didasarkan kepada ajaran Al-Quran dan sunah. Dalam konteks Indonesia, prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang lembaga keuangan syariah.²

Perbankan dalam kehidupan suatu Negara adalah salah satu agen pembangunan (*agen of development*). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.³

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu

¹Agus Arwani, *Akuntansi Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 75

²Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.52

³Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: UII, 2008), hlm.7

pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif.⁴ Bentuk pembiayaan produktif jika dilihat menurut keperluannya dapat dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.⁵

Salah satu bank yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan adalah bank BRI Syariah. Salah satu produk pembiayaan yang disalurkan adalah pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB .Pada BRI Syariah, produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini merupakan produk baru yang dirilis pada tahun 2017.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB merupakan produk pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang diperuntukan bagi nasabah yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.⁶ KUR adalah program pembiayaan dari pemerintah dengan memiliki margin yang rendah yaitu 7% karena sebagian *marginnya* disubsidi oleh pemerintah, sehingga produk ini sangat membantu para UMKM ataupun masyarakat yang baru memulai usahanya. Maka dari itu bank harus hati-hati dan tepat sasaran dalam menyalurkan pembiayaan ini.⁷

⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 160

⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik...* hlm.160

⁶Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 09 Tahun 2016

⁷Wawancara dengan bapak Andri selaku *Account Officer Marketing* Bank BRI Syariah KCP Majalaya pada tanggal 19 Januari 2018

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini diluncurkan oleh pemerintah dimana pada tahap awal melibatkan enam bank termasuk salah satunya bank syariah.⁸ Tujuan diluncurkannya program KUR adalah untuk pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM-K), hal ini dikarenakan jumlah usaha mikro kecil menengah semakin meningkat. Sebagai buktinya, dapat dilihat pada data Badan Pusat Statistik dimana pada tahun 2012 jumlah usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebanyak 99,99 persen dan sisanya 0,01 persen adalah usaha besar.⁹

UMKM memainkan peran penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, UMKM juga memiliki pengaruh besar terhadap jumlah pendapatan Negara, dan sekaligus meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.¹⁰

UMKM telah diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah. Pada Bab 1 Pasal 1 ayat 1, 2, 3 yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar

⁸<http://kur.ekon.go.id/kur-baru-memperluas-akses-pembiayaan--bagi-umkm>(Diakses tanggal 22 Januari 2018, pukul: 06:07 WIB)

⁹www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/nasional/kajian/Document/Profil%20Bisnis%20UMKM.pdf (Diakses tanggal 20 Januari 2018, pukul: 21:05 WIB)

¹⁰ Ai Siti farida, *Sistem Ekonomi Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm.46

yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.¹¹

Pada produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini sebenarnya sama saja dengan produk pembiayaan mikro lainnya, yang membedakannya yaitu dari lama usaha nasabah berjalan. Untuk pembiayaan mikro nasabah bisa mendapatkan pembiayaan jika usaha yang dijalankan nasabah sudah dua tahun, sementara pada produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) nasabah dapat menerima pembiayaan jika usaha yang dijalankan minimal sudah berjalan enam bulan. Selain itu, pada produk pembiayaan KUR ini tidak harus ada jaminan sementara pada pembiayaan mikro lainnya jaminan itu wajib dan nilainya harus sesuai dengan harga barang yang akan dibiayai.¹²

Dalam pelaksanaan pembiayaan KUR, bank BRI Syariah menggunakan akad *murabahah bil wakalah*. Hampir semua bank syariah di dunia didominasi dengan produk pembiayaan *murabahah*. Transaksi *murabahah* ini lazim dilakukan oleh

¹¹Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

¹²Wawancara dengan bapak Andri selaku *Account Officer Marketing* di Bank BRI Syariah KCP Majalaya

Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati.¹³

Wakalah menurut bahasa artinya adalah *al-hafidz*, *al-kifayah*, *al-dhaman* dan *al-tafwidh* (penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat).¹⁴ *Wakalah* dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 ditempatkan secara khusus sebagai akad yang dipergunakan oleh Bank Umum Syariah dalam melaksanakan fungsinya sebagai wali amanat. Artinya, Bank mewakili kepentingan pemegang surat berharga yang di simpan di, dan dipercayakan kepada, bank berdasarkan akad *wakalah*.¹⁵ Akad *wakalah* dalam *murabahah* juga telah ditetapkan dalam fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Maka dari itu, bank boleh mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan nasabah.

Dalam melaksanakan akad *murabahah* pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat ini, bank melakukan transaksi *murabahah* bersamaan dengan akad *wakalah*. Akad *murabahah* terjadi ketika bank menyerahkan uang kepada nasabah dan objek yang diperjual belikannya adalah barang jaminan dari nasabah.

Dengan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk memaparkan secara jelas dengan mencoba melakukan penelitian mengenai pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* untuk pembiayaan kredit usaha rakyat yang dilakukan oleh bank BRI Syariah KCP Majalaya. Dalam penelitian ini, penulis memberi judul **“Pelaksanaan**

¹³Adiwarman karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), hlm.161

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.231

¹⁵Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm.271

Akad *Murabahah bil Wakalah* Pada Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB di Bank BRI Syariah KCP Majalaya”

B. Rumusan Masalah

Dalam Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* pada *point* 9 disebutkan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang pada pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. Artinya, akad *murabahah* harus dilakukan setelah adanya aliran dana dari bank kepada *supplier* sebagai bukti bahwa bank telah membeli dan memiliki barang tersebut. Tetapi dalam pelaksanaannya, akad *murabahah* dilakukan sebelum adanya pembelian barang.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan yang telah penulis kemukakan di atas maka dengan ini dapat diambil pertanyaan:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* pada produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Syariah KCP Majalaya?
2. Bagaimana tinjauan fatwa DSN-MUI terhadap pelaksanaan akad *murabahah* dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di BRI Syariah KCP Majalaya?

C. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* pada produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Syariah KCP Majalaya.

2. Untuk mengetahui tinjauan fatwa DSN-MUI terhadap pelaksanaan akad *murabahah* dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di BRI Syariah KCP Majalaya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang perbankan syariah terkait dengan pelaksanaan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini di harapkan sebagai kontribusi pemikiran baru pada ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bank syariah juga relevansinya terhadap hukum ekonomi Islam.

E. Kerangka Pemikiran

1. Studi Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut penulis melakukan penelaahan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti, tujuannya adalah untuk menghindari adanya plagiasi atau pengulangan dalam penelitian ini, sehingga tidak terjadi adanya pembahasan yang sama dengan penelitian yang lain. Maka penulis perlu menjelaskan tentang topik penelitian yang penulis teliti yang berkaitan masalah tersebut beberapa kajian dan pembahasan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Syahrul Fitriadin Ramdani (2013) melakukan penelitian tentang pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat melalui akad *murabahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penyaluran KUR, mengetahui penerapan akad *murabahah* pada produk KUR, serta mengetahui relevansi antara praktik penyaluran KUR di Bank Syariah Mandiri KCP Ujungberung dengan konsep-konsep teori dalam Fiqh *Muamalah*. Hasil dari penelitian ini bahwa praktik penyaluran kredit usaha rakyat tidak sesuai dengan ketentuan *murabahah*, dimana bank tidak membeli pesanan barang yang diajukan nasabah melainkan dana tersebut langsung masuk ke rekening nasabah tanpa adanya akad *wakalah*.
- b. Rini Astriani (2013) melakukan penelitian tentang Pelaksanaan Akad *Murabahah bil Wakalah* Pada Program Pembiayaan Kepemilikan Emas Batangan di BRI Syariah Cabang Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur akad pembiayaan *murabahah* emas di BRI Syariah Cabang Bandung dan untuk mengetahui tinjauan fiqh *muamalah* terhadap akad pembiayaan *murabahah* di BRI Syariah Cabang Bandung.
- c. Muttaqin Nurhuda (2015), melakukan penelitian tentang Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah di BMT Palur Karanganyar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan akad *murabahah* di BMT Palur serta kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Hasil dari

penelitian ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan akad *murabahah* di BMT Palur sudah sesuai dengan prinsip yang ada karena tidak ditemukan hal-hal yang menyimpang dalam ajaran Islam dan telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

- d. Khoirul Anam (2009), melakukan penelitian tentang Analisis Praktek Pembiayaan Murabahah di PT. Federal International Finance (FIF) Syariah Demak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek pembiayaan *murabahah* di PT Federal International Finance (FIF) syariah Demak dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembiayaan *murabahah* di PT Federal International Finance (FIF) syariah Demak. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam paraktek *murabahah* yang dilakukan PT Federal International Finance (FIF) syariah Demak yaitu dalam menentukan harga perolehan barang ditambah dengan margin keuntungan yang diinginkan akan tetapi semua biaya yang dikeluarkan PT FIF Syariah Demak dimasukan kedalam harga dan dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* penawaran harga tidak disampaikan secara detail dan transparan mengenai harga pokok dan margin keuntungannya
- e. Iis Nuraisah (2013) melakukan penelitian mengenai Pelaksanaan Akad *Murabahah wa Al-wakalah* Pada Produk Pembiayaan BSM Implan di Bank Mandiri Syariah KCP Ujungberung. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui proses akad *murabahah* wa *al-wakalah* pada produk pembiayaan BSM implant dan kedudukan hukum penetapan *ujrah* pada pembiayaan BSM implan di BSM KCP Ujungberung Bandung.

- f. Junis Fadillah (2011) melakukan penelitian tentang Prospek Kredit Usaha Rakyat pada Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dan realisasi program KUR, mengetahui perkembangan realisasi penyaluran KUR dan laba bersih, mengetahui pengaruh penyaluran KUR terhadap laba bersih, serta mengetahui prospek KUR di Bank Syariah Mandiri melalui analisis SWOT. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa realisasi penyaluran KUR di Bank Syariah Mandiri mengalami fluktuasi naik dan turun, hal ini ditandai dengan rendahnya pengaruh KUR terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri.¹⁶
- g. Hauriatul Jannah (2017) melakukan penelitian tentang mekanisme pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro iB pada PT. BRI Syariah KCP Banda Aceh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui syarat dan ketentuan dalam pengajuan pembiayaan KUR, mengetahui proses pemberian pembiayaan KUR, serta mengetahui proses pemeliharaan pasca pencairan KUR. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa kegiatan pemberian pembiayaan KUR mikro iB memiliki

¹⁶Junis Fadillah, *Prospek Kredit Usaha Rakyat pada Bank Syariah Mandiri*. Diakses dari <http://Respository.uinjkt.ac.id>, tanggal 04 Januari 2018, pukul 19:36

beberapa tahapan mulai dari tahap pengajuan pembiayaan sampai dengan tahap pemeliharaan pasca pencairan.¹⁷

- h. Muhamad Nadrattuzaman Hosen (2014) melakukan penelitian tentang Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat pada Bank Syariah Mandiri di Kabupaten Pati. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pihak penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR), mengetahui kesesuaian birokrasi penyaluran KUR di Bank Syariah Mandiri dengan peraturan yang telah ada, dan untuk mengkalkulasi biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan KUR di BSM. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa karakteristik pihak penerima KUR BSM Kab. Pati diantaranya mayoritas berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 57.69%, mayoritas nasabah berumur antara 41-50 tahun yakni sebesar 30,77%, dan mayoritas berpendidikan terakhir SLTA dengan persentase 50%. Lalu, birokrasi pencairan dana KUR BSM Kab. Pati dilaksanakan secara langsung tanpa melalui linkage program, dan estimasi biaya transaksi dalam proses mendapatkan KUR BSM Kab. Pati, nasabah harus mengeluarkan dana sebesar 13,76 % dari limit dana KUR sebelum dia memperoleh dana KUR tersebut.¹⁸

¹⁷ Hauriatul Jannah, *Mekanisme Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB pada PT. BRI Syariah KCP Banda Aceh*. Diakses dari <http://respository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/229> , tanggal 18 Januari 2018, pukul 15:20 WIB

¹⁸ Muhamad Nadrattuzaman Hosen, “*Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat pada Bank Syariah Mandiri di Kabupaten Pati*” Jurnal Ekonomi Islam Vol. 3, No. 1, (Januari-Juni 2014), hlm. 65-67.

- i. Yuris Ikhromawati (2013) melakukan penelitian tentang efektivitas program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam mengembangkan usaha debitur KUR segmen mikro Bank Syariah Mandiri KC Bojonegoro. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah program KUR sudah efektif dalam mengembangkan usaha debitur segmen mikro. Hasil penelitian ini adalah program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BSM KC Bojonegoro sudah efektif dalam mendorong perkembangan usaha debitur segmen mikro.¹⁹
- j. Siti Nurjairah (2016) melakukan penelitian mengenai Mekanisme Pengendalian Risiko Investasi *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Temanggung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengendalian risiko pembiayaan investasi *murabahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Temanggung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian risiko pembiayaan investasi *murabahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Temanggung telah dilaksanakan dengan baik. Dibuktikan dengan pencapaian target diakhir tahun 2015 yang sangat baik di kolom pembiayaan atau lending/financing dengan hasil prestasi hingga 200% dan NPF 0%.

¹⁹Yuris Ikhromawati, *Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Mengembangkan Usaha Debitur KUR Segmen Mikro Di Bank Syariah Mandiri KC Bojonegoro*. Diakses dari <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/16479>, tanggal 20 Januari 2018, pukul 18:30 WIB

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Syahrul Fitriadin Ramdani, Program studi muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013.	Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Melalui Akad <i>Murabahah</i> di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung Bandung	Membahas akad <i>murabahah</i> pada produk Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Dalam penelitian ini, lebih membahas pada praktik penyaluran kredit usaha rakyat yang tidak sesuai dengan ketentuan <i>murabahah</i> , dimana bank tidak membeli pesanan barang yang diajukan nasabah melainkan dana tersebut langsung masuk ke rekening nasabah

Lanjutan Tabel 1.1

				tanpa adanya akad <i>wakalah</i>
2	Rini Astriani, Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Pelaksanaan Akad <i>Murabahah bil</i> <i>Wakalah</i> Pada Program Pembiayaan Kepemilikan Emas Batangan di BRI Syariah Cabang Bandung	Membahas tentang akad murabahah pada pembiayaan di bank BRI Syariah	Skripsi ini membahas transaksi <i>murabahah</i> yang tidak sah transaksinya secara syariah, karena menjual emas tidak secara tunai dan tidak diserahkan pada saat dilakukannya akad, yang mana hal tersebut akan menyebabkan timbulnya riba.
3	Muttaqin Nurhuda,	Analisis Pelaksanaan	Membahas akad	Skripsi ini membahas akad

Lanjutan Tabel 1.1

	Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.	Akad Pembiayaan <i>Murabahah</i> di BMT Palur Karanganyar	<i>murabahah</i>	<i>murabahah</i> yang sudah sesuai dengan prinsip syariah dan Fatwa DSN- MUI No. 04/DSN MUI/IV/2000.
4	Khoirul Anam, Program Studi Muamalah, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2009.	Analisis Praktek Pembiayaan <i>Murabahah</i> di PT. Federal International Finance (FIF) Syariah Demak	Membahas akad <i>murabahah</i>	Skripsi ini membahas praktek <i>murabahah</i> yang tidak memenuhi syarat <i>murabahah</i> dalam fiqh, karena penawaran harga tidak sampai

Lanjutan Tabel 1.1

				kan secara detail dan transparan mengenai harga pokok dan margin keuntungan yang diinginkan oleh pihak FIF syari'ah
5	Iis Nuraisah, program studi muamalah, fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013	Pelaksanaan Akad <i>Murabahah wa Al-wakalah</i> Pada Produk Pembiayaan BSM Implan di Bank Syariah Mandiri KCP Ujungberung	Membahas akad <i>murabahah</i> dan <i>wakalah</i>	Skripsi ini membahas mengenai diharuskannya nasabah membayar <i>ujrah</i> kepada pihak instansi/perusahaan atas akad <i>wakalah</i> yang dilakukan keduanya.

Lanjutan Tabel 1.1

				Dimana hal ini belum sepenuhnya memenuhi salah satu asas-asas perjanjian yaitu asas keadilan.
6	Juis Fadilah, program studi Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2011.	Prospek Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Mandiri	Membahas kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah	Skripsi ini lebih membahas pada realisasi penyaluran KUR di Bank Syariah Mandiri yang mengalami fluktuasi naik dan turun

Lanjutan Tabel 1.1

7	Hauriatul Jannah, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry, 2017.	Mekanisme Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB pada PT. BRI Syariah KCP Banda Aceh	Membahas tentang KUR pada bank BRI Syariah	Skripsi ini lebih membahas kepada tahapan pemberian pembiayaan
8	Muhamad Nadrattuzaman Hosen	Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Mandiri Di Kabupaten Pati	Membahas tentang pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Jurnal ini lebih membahas kepada pelaksanaan KUR dengan mengidentifika si beberapa hal dalam menjalankan program KUR

Lanjutan Tabel 1.1

9	Yuris Ikhromawati, Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Social dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, 2013.	Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Megembangkan Usaha Debitur KUR segemen Mikro Bank Syariah Mandiri KC Bojonegoro	Membahas tentang pembiayaan kredit usaha rakyat	Skripsi ini lebih membahas pada tingkat efektivitas KUR dalam mendorong perkembangan usaha debitur segmen mikro
10	Siti Nurjairah, program studi manajemen perbankan syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2016.	Mekanisme Pengendalian Risiko Pembiayaan Investasi <i>Murabahah</i> di Bank Syariah Mandiri KCP Temanggung	Membahas akad <i>murabahah</i>	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian risiko pembiayaan investasi <i>Murabahah</i> di BSM KCP

Lanjutan Tabel 1.1

				Temanggung telah dilaksanakan dengan baik
--	--	--	--	--

Sedangkan penulis dalam penelitian ini membahas tentang pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* pada produk pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) Mikro iB di Bank BRI Syariah KCP Majalaya.

2. Kerangka Pemikiran

Perbankan syariah adalah salah satu lembaga yang dapat dijadikan sebagai alternatif untuk suatu usaha. Dalam perbankan syariah ini, konsumen bisa mengajukan pembiayaan untuk keperluan barang ataupun dana berdasarkan akad yang di sepakati.

Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²⁰

Menurut Adiwarman Karim bahwa akad dapat dilihat dari segi ada atau tidak adanya kompensasi. Bentuk akad tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu:²¹

a. Akad *tabaru*

²⁰Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 1

²¹Adiwarman A Karim, *Bank Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 66

Akad *tabaru* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba) akad *tabaru* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan, dalam akad *tabaru* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Contoh akad-akad *tabaru* adalah *qard*, *rahn*, *hiwalah*, *wakalah*, *hibah*, *waqf*, *shadaqh*, *hadiah* dan lain-lain.

b. Akad *tijarah*/ *mu'awadah*

Akad *tijarah* adalah akad-akad yang dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Contoh akad *tijarah* adalah akad-akad investasi, jual-beli, sewa-menyewa, dan lain-lain. Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad *tijarah* pun dapat kita bagi menjadi dua kelompok besar, yaitu *Natural uncertainty contract* dan *Natural certainty contract*.

Natural certainty contract merupakan kontrak atau akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) ataupun waktu (*timing*). Dengan kata lain, dalam *natural certainty contract* ini, kedua belah pihak saling mempertukarkan *asset* yang dimiliki. Oleh karena itu objek pertukarannya pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlah (*quantity*), mutu (*quality*), harga (*price*), maupun waktu penyerahannya (*time of delivery*). Jadi, kontrak-kontrak tersebut secara *sunnatullah* memberikan *return* yang tetap dan pasti. Yang termasuk

kedalam kategori ini adalah *murabahah, ijarah, ijarah muntahiyah bit tamlik, salam, dan istishna*.²²

Natural uncertainty contract adalah kontrak atau akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*). Dengan demikian dalam NUC ini tingkat *return* bisa positif, negatif maupun nol. Yang termasuk ke dalam kategori ini adalah *mudharabah, musyarakah, muzara'ah, musaqah, dan mukhabarah*.²³

Berdasarkan Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Pasal 1 ayat (13) prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudhārabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyārahah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murābahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijārah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijārah wa iqtina*).

²²Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.238

²³Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah...* hlm. 283

Salah satu skim fiqih yang diterapkan oleh perbankan syariah adalah skim jual beli *murabahah*, dimana bank menggunakan dua alternatif yaitu skema *murabahah* tanpa *wakalah* dan skema *murabahah* dengan *wakalah*. Skema *murabahah* tanpa *wakalah* digunakan ketika bank dapat secara langsung melakukan pembelian terhadap barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Sedangkan *murabahah* dengan *wakalah* digunakan ketika bank tidak dapat secara langsung melakukan pembelian terhadap barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah.

Murabahah adalah jual beli barang dengan alat tukar disertai tambahan yang telah ditentukan (*resale with a stated profit*).²⁴ Sedangkan *wakalah* merupakan pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu.²⁵

Salah satu ayat Al-Quran yang membolehkan *murabahah* adalah surat Al-Baqarah (2) ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

“Orang-orang yang Makan (mengambil) *riba* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan *riba*, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan

²⁴ Yadi janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 15

²⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 19

dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil *riba*), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”²⁶

Sedangkan salah satu ayat Al-Quran yang membolehkan *wakalah* adalah surat Al-Kahfi (18) ayat 19:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۝ ١٩

“Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya diantara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang diantara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada disini?. Mereka menjawab: “Kita berada (disini) sehari atau setengah hari”. Berkata (yang lain lagi)” “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (disini). Maka suruhlah salah seorang diantara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.”²⁷

Dalam bidang *muamalah* semua transaksi dibolehkan kecuali yang diharamkan. Penyebab haramnya sebuah transaksi adalah disebabkan faktor-faktor sebagai berikut.²⁸

1. Haram zatnya (*haram li-dzatihi*)

Transaksi dilarang karena objek (barang dan/jasa) yang ditransaksikan juga dilarang, misalnya minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Jadi, transaksi jual beli minuman keras

²⁶Soenarjo dkk, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005) hlm. 67

²⁷Soenarjo dkk, *Al-Quran dan Terjemahan* ... hlm. 456

²⁸Adiwarman A. Karim, *Bank Syariah* ... hlm.30

adalah haram, walaupun akad jual bellinya sah. Dengan demikian bila ada nasabah yang mengajukan pembiayaan pembelian minuman keras kepada bank dengan menggunakan akad *murabahah*, maka walaupun akadnya sah tetapi transaksi ini haram karena objek transaksinya haram.

2. Haram selain zatnya (*haram li ghairihi*)

a. Melanggar prinsip “*An Taradin Minkum*”

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu) karena terdapat kondisi yang bersifat *unknown to one party* (keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ini disebut juga *assymetric information*). *Unknown to oneparty* dalam bahasa fiqihnya disebut *tadlis*.

b. Melanggar prinsip ‘*La Tazhlimuma wa la Tuzhlamun*’

Yaitu jangan menzalimi dan jangan dizalimi. Salah satu praktik yang melanggar prinsip ini adalah riba.

3. Tidak sah (lengkap) akadnya

Suatu transaksi yang tidak masuk dalam kategori *haram li dzatihi* maupun *haram li ghairihi*, belum tentu serta merta menjadi haram. Masih ada kemungkinan transaksi tersebut menjadi haram bila

akad atas transaksi itu tidak sah atau tidak lengkap. Suatu transaksi dikatakan tidak sah dan/atau tidak lengkap akadnya bila terjadi salah satu (lebih) faktor-faktor yaitu rukun dan syarat tidak terpenuhi, terjadi *ta'alluq*, terjadi *two in one*.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Yaitu dengan mendeskripsikan atau menggambarkan pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* pada produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro iB di Bank BRI Syariah KCP Majalaya berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.²⁹

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata, skema, dan gambar.³⁰ Data-data tersebut berupa data yang diperoleh dari bank BRI Syariah KCP Majalaya yang berkaitan dengan akad *murabahah bil wakalah* pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

3. Sumber Data

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 29

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*... hlm. 14

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan data, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang didapat dari sumber pertama, dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan para pihak yang ada di Bank BRI Syariah KCP Majalaya.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang penulis peroleh dari data lain yang menunjang sumber data primer seperti buku-buku, serta sumber lain yang berkaitan dengan materi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait seperti, BOS, *Account officer Marketing*, *customer service* dan karyawan lain yang ada di Bank BRI Syariah KCP Majalaya.

- b. Studi Kepustakaan

Yaitu suatu teknik pengolahan yang di ambil dari berbagai literatur atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli, guna mendapatkan landasan teoritis tentang masalah yang diteliti.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang diperoleh dari informan atau narasumber serta literatur yang terkait dengan penelitian;
- b. Klasifikasi data, yaitu memisahkan antara data yang diperoleh dari hasil penelaahan, wawancara serta studi kepustakaan;
- c. Mengaji data-data yang dipilih;
- d. Menghubungkan data dan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran; dan
- e. Menarik kesimpulan.

